
Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia

M. ARIF FAHMI NST

Administrasi Publik

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dalam era digital saat ini, TI menawarkan beragam inovasi yang memungkinkan pemerintah untuk merespons tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Artikel ini membahas peran TI dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana TI dapat memperbaiki proses dan hasil kebijakan yang diimplementasikan.

Melalui analisis berbagai inisiatif, seperti sistem e-Government dan aplikasi berbasis web, artikel ini menggambarkan bagaimana TI dapat mengoptimalkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. TI berkontribusi dalam penyediaan data yang akurat untuk pengambilan keputusan, memfasilitasi partisipasi publik dalam proses legislasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam artikel ini, juga akan dibahas berbagai studi kasus penerapan TI yang telah menunjukkan dampak positif, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan inisiatif Open Data.

Meskipun TI memiliki potensi besar, tantangan seperti infrastruktur yang terbatas, kesenjangan digital, isu keamanan dan privasi data, serta perubahan budaya organisasi masih perlu diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melanjutkan investasi dalam TI dan mengembangkan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi ini di semua tingkat pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan TI dapat berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih baik di Indonesia.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Kebijakan Publik, Implementasi, Digitalisasi, Aplikasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk dan lebih dari 17.000 pulau, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan publik yang efektif. Dengan beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, pemerintah harus menghadapi kompleksitas dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah tantangan tersebut, teknologi informasi (TI) muncul sebagai alat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. TI dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang semuanya merupakan elemen kunci dalam proses kebijakan publik yang efektif.

Di era digital ini, teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah dan masyarakat berinteraksi. Berbagai inisiatif TI, seperti sistem e-Government, aplikasi mobile, dan platform media sosial, telah diperkenalkan untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi. Dengan adanya TI, informasi yang relevan mengenai kebijakan publik dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Misalnya, platform media sosial dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan masyarakat, sedangkan aplikasi mobile memungkinkan akses langsung kepada layanan publik.

Namun, meskipun terdapat potensi besar, penerapan TI dalam kebijakan publik di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Infrastruktur TI yang masih terbatas, terutama di daerah terpencil, menghambat distribusi informasi dan layanan publik. Kesenjangan digital juga menjadi kendala, di mana sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan, belum sepenuhnya mengakses teknologi modern. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan dalam partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Selain itu, isu keamanan dan privasi data menjadi perhatian serius yang perlu ditangani oleh pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan TI.

Pentingnya TI dalam kebijakan publik semakin terasa ketika pemerintah harus merespons dinamika dan perubahan yang cepat. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan berbasis data menjadi semakin relevan. TI memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time, memberikan wawasan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan. Dengan memanfaatkan data yang ada, pemerintah dapat

memahami tren dan pola yang berkembang di masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, beberapa inisiatif TI telah berhasil menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Misalnya, penggunaan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) telah membantu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Selain itu, inisiatif open data yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap data publik, mendorong partisipasi aktif, dan meningkatkan akuntabilitas.

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih dalam mengenai peran TI dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dengan mengidentifikasi kelebihan dan tantangan yang ada, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya TI dalam mendukung pembangunan dan reformasi kebijakan publik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat muncul rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan TI untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Pembahasan

Teknologi informasi (TI) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dengan kemampuannya untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan berbasis data, TI dapat mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Pembahasan ini akan menguraikan peran TI dalam implementasi kebijakan publik melalui beberapa aspek kunci: transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, pengambilan keputusan berbasis data, serta penyampaian layanan publik yang lebih baik.

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu manfaat utama TI adalah kemampuannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan, transparansi mengacu pada sejauh mana informasi tentang keputusan, proses, dan hasil kebijakan dapat diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas, di sisi lain, merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan tindakan dan keputusan mereka kepada publik.

Penerapan sistem e-Government di Indonesia, misalnya, telah membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya publik. Portal e-Government memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang pengeluaran pemerintah, proyek-proyek yang sedang berjalan, dan laporan kegiatan lainnya secara real-time. Dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap informasi publik, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil. Ini, pada gilirannya, mendorong akuntabilitas di kalangan pejabat publik, yang merasa diawasi oleh masyarakat.

2. Memfasilitasi Partisipasi Publik

TI juga berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan munculnya platform media sosial dan aplikasi mobile, pemerintah dapat lebih mudah menjangkau masyarakat dan mengumpulkan umpan balik mereka. Partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan menjadi lebih inklusif, memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memberikan pendapat dan masukan.

Contoh yang jelas dari hal ini adalah penggunaan aplikasi seperti "Lapor!" yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah atau keluhan terkait pelayanan publik secara langsung kepada pemerintah. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga mempercepat proses penyelesaian masalah. Dengan sistem ini, masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan, yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi publik juga dapat diukur melalui konsultasi publik yang dilakukan secara online. Melalui platform digital, pemerintah dapat mengundang masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang sedang disusun. Ini menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, yang sangat penting dalam menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Pengambilan keputusan berbasis data merupakan aspek lain yang sangat penting dalam kebijakan publik. Dengan adanya TI, pemerintah dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Sistem informasi manajemen yang baik dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

Misalnya, penggunaan *big data* dan analisis data besar dalam perencanaan kota dapat membantu pemerintah memahami pola perilaku masyarakat, kebutuhan infrastruktur, dan tantangan yang ada. Dengan informasi ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan. Contoh lainnya adalah penggunaan data statistik dalam kebijakan kesehatan, di mana pemerintah dapat mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal akses layanan kesehatan.

Dalam konteks ini, TI tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data, tetapi juga sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Dengan bantuan teknologi analisis data, pemerintah dapat membuat prediksi yang lebih akurat dan merumuskan kebijakan yang lebih baik, serta memonitor implementasi kebijakan secara lebih efektif.

4. Penyampaian Layanan Publik yang Lebih Baik

Salah satu dampak positif dari penerapan TI dalam kebijakan publik adalah peningkatan kualitas layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat menyederhanakan proses administrasi, mempercepat waktu respon, dan meningkatkan aksesibilitas layanan. Contohnya adalah sistem pengajuan izin secara online yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan dengan lebih mudah dan cepat.

Inisiatif seperti pelayanan publik satu atap (*one-stop service*) yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform juga membantu mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah. Dengan adanya sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi berbagai kantor pemerintah untuk mendapatkan informasi dan layanan yang mereka butuhkan.

Selain itu, TI juga memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Dengan menggunakan media sosial dan aplikasi mobile, pemerintah dapat memberikan informasi terbaru tentang layanan publik, kebijakan, dan program-program yang sedang berjalan. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

5. Studi Kasus: Penerapan TI dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Beberapa contoh penerapan TI dalam kebijakan publik di Indonesia menunjukkan dampak positif yang signifikan. **Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**, misalnya, adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah. Dengan menggunakan SIMDA, pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan secara real-time kepada masyarakat. Hal ini membantu dalam pengawasan penggunaan anggaran dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

E-Desa juga merupakan platform digital yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan E-Desa, masyarakat dapat mengakses informasi tentang program pemerintah, mengajukan layanan, dan memberikan umpan balik. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Di sisi lain, **inisiatif Open Data** yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk menyediakan data publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan mempublikasikan data tentang berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, pemerintah berharap masyarakat dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan analisis dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

6. Tantangan dalam Penerapan TI

Meskipun TI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Infrastruktur TI yang terbatas, terutama di daerah terpencil, menghambat penerapan teknologi secara luas. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda, dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam akses terhadap informasi dan layanan publik. Selain itu, isu keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian penting dalam penerapan TI. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa data pribadi mereka akan aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Kesimpulan

Peran teknologi informasi (TI) dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik di Indonesia sangat signifikan. Dengan memanfaatkan TI, pemerintah dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat. Melalui berbagai inisiatif, seperti sistem e-Government, aplikasi mobile, dan portal data terbuka, TI telah membantu menciptakan interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

Namun, meskipun potensi TI sangat besar, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya harus diatasi. Infrastruktur yang masih terbatas, kesenjangan digital, serta isu keamanan dan privasi data perlu menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Ketersediaan akses TI yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil, menjadi sangat penting agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari teknologi ini.

Untuk memaksimalkan potensi TI dalam kebijakan publik, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur TI dan melaksanakan program pendidikan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, TI dapat berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan akuntabel, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, TI bukan hanya alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan TI, Indonesia dapat mengoptimalkan kebijakan publik demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muda, I. (2012). *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Aparatur*.
- Nasution, I., & Dewi, R. (2011). *Kesiapan Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan*.
- Jamil, B. (2020). *Komunikasi Sosial dan Respon Masyarakat Terhadap Covid-19 antara dan Maut dan Perut*.
- Hendra, Y., & Barus, R. K. I. (2017). *Strategi Komunikasi Pemasaran Event Organizer Silent Studio Medan dalam Mendapatkan Kepercayaan Pelanggan*.
- Tarigan, U. (2007). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Persatuan amal Bakti (PAB) Sumatera Utara*.
- Hidayat, T. W. (2008). *Komunikasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Nasution, I., & Muda, I. (2013). *Fungsi Pengelolaan Arsip Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Kerja Pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nst, M., & Lubis, A. A. (2011). *Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menanggulangi Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, Y., & Lubis, A. A. (2011). *Pelaksanaan Pembinaan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*.
- Jamil, B., & Barus, R. K. I. (2012). *Peranan Komunikasi Antarpribadi Perawat dalam Menghadapi Proses Persalinan pada Pasien di Klinik Bersalin (Studi Kasus di Klinik Dr Makmur SPOG (K) Sei Mencirim Medan)*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Lubis, A. A. (2013). *Efektivitas Motivasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Muda, I. (2020). *Corona Mengintai Pemudik*.
- Siregar, N. S. S., & Jamil, B. (2016). *Komunikasi Terapeutik Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Hemodialysis di Rumah Sakit Columbia Asia Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Dewi, R., & Jamil, B. (2014). *Pelaksanaan Kebijakan Program Supra Insus dalam Meningkatkan Penghasilan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). *Kinerja Birokrasi dalam Pemberian Reward dan Punishment untuk Peningkatan Produktifitas Kerja dan Pengembangan Karir Pegawai pada Sekretariat DPRK Langsa*.
- Hasibuan, E. J. (2022). *Efektivitas Kinerja Pegawai Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias*.
- Harahap, R. H., & Lubis, M. S. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Medan (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S., & Hasibuan, E. J. (2007). *Pengaruh Ilmu dan Teknologi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PT. Pertamina Persero UP I Pangkalan Brandan*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Siregar, T., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Pendidikan dan Latihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nst, M., & Lubis, A. A. (2012). *Penataan Kearsipan dalam Menunjang Kinerja Pegawai di Kantor WKB Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, M. S. (2023). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Effendy, S., & Ritonga, S. (2022). *Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pengolahan Ptpn Iii Rantauprapat*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Nasution, I., & Lubis, A. A. (2012). *PERANAN LURAH SELAKU PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN BINJAI ESTATE KECAMA TAN BINJAI SELATAN*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Implementasi Pergub No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Aceh di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*.
- Suharyanto, A. (2020). *Memahami Struktur Umum Sistematikan Penulisan Untuk Publikasi Pada Jurnal Ilmiah*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, A. (2012). *Analisa Permasalahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantor Camat Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang..*